

**Peran Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi Nasional Indonesia**

Wira Yudha Alam¹, Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani², Muhles³, Nur Irvia Dhea
Agustin⁴

¹ Program Studi Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Adibuana Surabaya

¹dwiramadhaninadiaalkhalifa@gmail.com.

ABSTRACT

Economic growth is one of the main indicators in assessing the success of a country's development. Stable economic growth reflects an increase in production, consumption, investment, and public welfare activities. In the Indonesian context, the government has a very important role in regulating and directing the national economy through various economic policies. The government's economic policy basically aims to maintain economic stability, encourage economic growth, create jobs, and improve the welfare of the community. This research aims to analyse the role of government economic policy towards Indonesia's economic growth. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach. The data used is secondary data obtained from books, scientific journals, official reports of the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, Ministry of Finance, and other relevant sources. Research results show that the government's economic policy has a significant role in driving Indonesia's economic growth. Fiscal policy plays a role through government spending, subsidies, tax incentives, and infrastructure development. Monetary policy plays a role in maintaining the stability of inflation, interest rates, and the rupiah exchange rate. Meanwhile, structural reform plays a role in increasing productivity, investment, economic competitiveness, and transformation of the national economic sector. Thus, Indonesia's economic growth cannot be separated from the effectiveness and synergy of government economic policies that are implemented sustainably.

Keywords: Economic policy 1, economic growth 2, fiscal policy 3, monetary policy 4.

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil mencerminkan adanya peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal berperan melalui pengeluaran pemerintah, subsidi, insentif pajak, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, reformasi struktural berperan dalam meningkatkan produktivitas, investasi, daya saing ekonomi, dan transformasi sektor ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari efektivitas dan sinergi kebijakan ekonomi pemerintah yang diterapkan secara berkelanjutan

Kata Kunci:Kebijakan ekonomi 1, pertumbuhan ekonomi 2, kebijakan fiskal 3, kebijakan moneter 4.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan

kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada kemajuan aktivitas perekonomian yang meningkatkan produksi barang dan jasa di masyarakat, sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan

penduduk. Masalah ini termasuk dalam ranah makroekonomi jangka panjang. Peningkatan kemampuan produksi akibat penambahan faktor-faktor produksi biasanya tidak selalu menghasilkan peningkatan output yang sebanding. Potensi produksi yang bertambah sering kali lebih tinggi daripada produksi aktual, sehingga laju perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat daripada kemampuannya. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja perekonomian secara nyata di suatu wilayah, dengan laju pertumbuhannya dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. (Sadono Sukirno 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa.

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara sebagai penyebab meningkatnya produksi barang dan jasa, serta kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang.

Meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan kualitas faktor produksi, seperti investasi dan tenaga kerja. Salah satu indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Untoro (2010:39)

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan prioritas dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan yang tinggi dan stabil diharapkan dapat menyeimbangkan peningkatan produksi, distribusi pendapatan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sering

menghadapi berbagai kendala, seperti inflasi, pengangguran, rendahnya produktivitas, ketimpangan antarwilayah, fluktuasi investasi, dan ketidakpastian ekonomi global yang mengancam kestabilan serta keberlanjutan pertumbuhan nasional.

Pemerintah memegang peran strategis dalam mengelola dan mengarahkan aktivitas perekonomian untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain sebagai regulator, pemerintah juga bertindak sebagai penggerak utama pembangunan melalui kebijakan yang menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Menurut teori ekonomi modern, khususnya pandangan Keynes, pemerintah perlu berperan aktif ketika mekanisme pasar gagal mencapai keseimbangan optimal.

Kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan melalui instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal (pengelolaan anggaran negara, perpajakan, dan belanja pemerintah untuk merangsang aktivitas ekonomi), kebijakan moneter (pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas keuangan), serta kebijakan pembangunan (seperti dorongan

investasi, infrastruktur, dan pemberdayaan industri serta UMKM).

Dalam praktiknya, kebijakan ini memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi. Kebijakan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan memajukan sektor strategis. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat berisiko menghambat pertumbuhan serta memicu masalah seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan.

Di Indonesia, pemerintah telah berupaya keras menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, reformasi kebijakan, dan peningkatan investasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini kami pakai supaya bisa menggambarkan secara lebih dalam dan detail tentang apa saja peran kebijakan pemerintah dalam membantu mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional Indonesia. Menggunakan metode kualitatif cocok untuk eksplorasi mendalam, karena dapat memahami konteks, alasan di balik kebijakan itu, dan dampak nyata terhadap perekonomian kita sehari-hari.

Sementara itu, pendekatan deskriptif difokuskan untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang sedang terjadi, berdasarkan informasi relevan dan data-data yang sudah tersedia, seperti laporan resmi pemerintah, data BPS, Pusat statistic, atau studi kasus sebelumnya. Dengan cara ini, penelitian ini jadi lebih mudah dipahami, karena kami tidak hanya sekedar narasiin fakta, tapi juga mengaitkannya dengan realitas Indonesia sebagai negara berkembang yang masih bergulat dengan tantangan seperti ketimpangan dan fluktuasi global. Intinya, metode ini membantu kita lihat gambaran lengkap bagaimana pemerintah bergerak untuk bikin ekonomi kita tumbuh lebih kuat dan merata.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan ekonomi pemerintah merupakan rangkaian langkah, keputusan, serta tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan aktivitas perekonomian, demi mencapai sasaran pembangunan nasional. Sasaran utamanya meliputi

pemeliharaan stabilitas ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Boediono (2016), kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memengaruhi jalannya perekonomian melalui berbagai instrumen ekonomi. Kebijakan ekonomi diperlukan agar perekonomian tidak berjalan tanpa arah, melainkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi

pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,86 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68 persen.

Selama tahun 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93

persen dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c).

Informasi ini kami dapatkan melalui website badan pusat statistik Indonesia yang membahas mengenai, Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.



Gambar 1 Pertumbuhan perekonomian Indonesia triwulan 2025 (Sumber : Badan pusat statistic Indonesia)

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Yang memiliki tujuan untuk mencakup pengendalian inflasi, mengurangi pengangguran, mengatur pertumbuhan ekonomi, serta melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal menjadi elemen dasar dalam sistem ekonomi modern, di mana pemerintah mengarahkan perkembangan ekonomi lewat pengelolaan penerimaan (seperti pajak) dan pengeluaran negara. Di Indonesia sendiri kebijakan ini dikelola oleh Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan, dan melindungi kesejahteraan rakyat. Dengan fokus utamanya adalah:

1. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan sumber lain.
2. Mengalokasikan belanja untuk pembangunan dan layanan publik.

Peran Kebijakan Fiskal di Perekonomian Indonesia

Belakangan ini, kebijakan fiskal berperan krusial menghadapi tekanan global seperti perlambatan ekonomi dunia, kenaikan suku bunga internasional, dan fluktuasi harga komoditas. Pemerintah menerapkan strategi seperti:

1. Penguatan APBN yang adaptif dan cepat tanggap.
2. Peningkatan penerimaan pajak via digitalisasi.
3. Belanja besar untuk perlindungan sosial.
4. Penguatan ketahanan energi dan pangan.
5. Investasi infrastruktur dan teknologi.

Strategi ini menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan

ekstrem, serta memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Cara Kerja Kebijakan Fiskal

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah merangsang aktivitas ekonomi dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Contoh nyatanya adalah peningkatan belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan bantuan sosial, yang mempercepat perputaran ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta mendorong konsumsi.

Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi tidak hanya memperbaiki konektivitas, tapi juga menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) yaitu: menyerap tenaga kerja, meningkatkan permintaan bahan baku, dan memperlancar distribusi barang-jasa. Dampaknya tidak hanya jangka pendek, tapi juga memperkuat produktivitas jangka panjang.

Selain itu, insentif perpajakan seperti pengurangan atau fasilitas pajak bagi pelaku usaha mendorong investasi dan ekspansi bisnis, terutama saat ekonomi melambat. Subsidi dan bantuan sosial pun menjaga stabilitas harga, daya beli, serta konsumsi kelompok berpenghasilan rendah.

Kesimpulannya, kebijakan fiskal ini sangatlah vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pengeluaran yang tepat sasaran, insentif ekonomi, dan dukungan sektor produktif, pemerintah menciptakan

perekonomian yang lebih dinamis dan berkelanjutan.

Pengaruh kebijakan moneter pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menstabilkan nilai mata uang.

Peran Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini, Beberapa tahun belakangan, dinamika global seperti kenaikan suku bunga The Fed, perlambatan ekonomi China, dan fluktuasi harga komoditas telah menekan perekonomian nasional Indonesia. Bank Indonesia (BI) menanggapi hal ini dengan kebijakan moneter yang fleksibel dan terpadu, di antaranya:

- Memperkuat suku bunga untuk menjaga kestabilan rupiah.
- Mengendalikan inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah.
- Mempercepat transaksi ekonomi lewat digitalisasi sistem pembayaran.
- Memperkokoh ketahanan sektor perbankan.

Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga stabilitas Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Instrumen Kunci hal tersebut yaitu Suku Bunga, Suku bunga merupakan salah satu alat utama kebijakan moneter yang sangat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Jika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau, sehingga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan konsumsi serta investasi. Sebaliknya, saat inflasi melonjak tinggi, BI dapat menaikkan suku bunga guna menekan permintaan berlebih dan menjaga kestabilan harga.

Pentingnya Stabilitas Inflasi, Inflasi yang stabil menjadi syarat esensial untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan biaya produksi perusahaan, yang berujung pada penghambatan aktivitas ekonomi. Karenanya, kebijakan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi memberikan kepastian bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan investor untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan lancar.

Instrumen Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) menggunakan beberapa instrumen utama untuk mengendalikan likuiditas di pasar keuangan. Berikut penjelasannya:

1. Suku Bunga Acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate)

Ini adalah patokan utama kebijakan moneter. Kenaikan atau penurunan BI-Rate langsung berdampak pada

suku bunga kredit dan simpanan di perbankan.

2. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga oleh BI untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

3. Giro Wajib Minimum (GWM)

Persentase dana yang harus disimpan bank di BI. Semakin tinggi GWM, semakin terbatas dana yang bisa dikururkan ke publik sebagai pinjaman.

4. Intervensi Nilai Tukar

BI melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

5. Makroprudensial

Alat seperti countercyclical capital buffer dan rasio pembiayaan makroprudensial digunakan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kebijakan struktural: Kebijakan ini dapat memperbaiki struktur ekonomi di Indonesia

Reformasi struktural adalah kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki struktur perekonomian agar lebih efisien, produktif, kompetitif, dan berkelanjutan. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga pada

pembentukan fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan.

Bentuk reformasi struktural antara lain:

- pembangunan infrastruktur,
- peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- kemudahan berusaha,
- penguatan UMKM,
- digitalisasi ekonomi,
- hilirisasi industri,
- serta peningkatan investasi.

Reformasi struktural penting karena pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh konsumsi, tetapi juga harus didukung oleh produktivitas, efisiensi, dan transformasi sektor ekonomi.

Tantangan Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun kebijakan ekonomi pemerintah berperan krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala. Kendala ini harus dipahami dengan baik agar kebijakan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian ekonomi global. Perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi dunia,

konflik geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, serta gejolak pasar keuangan internasional. Hal-hal ini berdampak pada ekspor, investasi, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Tantangan lain mencakup inflasi, pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Walaupun pertumbuhan ekonomi naik, manfaatnya belum merata dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan.

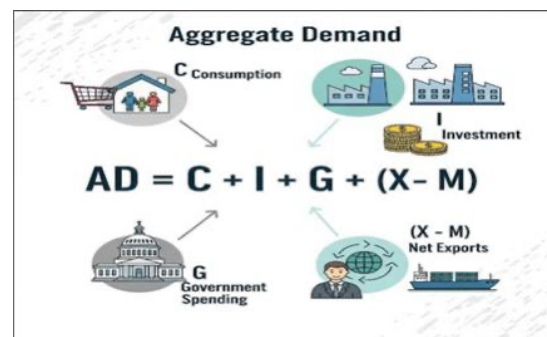
Di sisi implementasi, hambatan seperti birokrasi yang lambat, penyaluran anggaran yang kurang efisien, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sering menjadi masalah. Kebijakan yang bagus di atas kertas belum tentu berhasil jika eksekusinya di lapangan lemah.

Selain itu, perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan isu lingkungan muncul sebagai tantangan baru. Pemerintah perlu terus mengevaluasi, menyesuaikan, dan berinovasi dalam kebijakannya untuk mengatasi dinamika zaman dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya bergantung pada kualitas rancangannya, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Peran APBN dalam mendorong pembangunan sebagai upaya mendorong perekonomian nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat fiskal pokok pemerintah yang sangat penting untuk menggerakkan, menstabilkan, dan pemeratakan perekonomian Indonesia. Seperti pedal gas dan rem pada mobil, APBN tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat pengendali laju ekonomi agar tetap seimbang di tengah berbagai tantangan. Di saat rencana efisiensi anggaran tahun 2025 sedang digaungkan, pemahaman tentang peran APBN menjadi semakin penting.



Gambar 2 Rumus peranan APBN, (Sumber :Kemenkeu Leearning Center).

Peran APBN dalam memacu perekonomian dapat dilihat dari konsep pengeluaran pemerintah atau Government Expenditure (G). Dalam model ekonomi makro sederhana, pengeluaran pemerintah adalah salah satu pilar utama Permintaan Agregat (Aggregate Demand/AD), yang dirumuskan sebagai:

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

Rumus ini menjelaskan bahwa total permintaan suatu negara berasal dari empat sumber: konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G), serta ekspor dikurangi impor (X - M). Setiap elemen saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pada salah satu atau lebih komponen—misalnya, saat masyarakat lebih banyak berbelanja atau pemerintah menambah belanja akan meningkatkan permintaan agregat secara keseluruhan, yang biasanya memicu pertumbuhan ekonomi.

Contohnya, ketika pemerintah menaikkan pengeluaran (G) untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara, hal ini menciptakan permintaan baru terhadap bahan baku, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Dampaknya, aktivitas ekonomi bergairah, pendapatan masyarakat naik, serta konsumsi (C) dan investasi (I) ikut terdongkrak. Proses berantai ini disebut efek pengganda fiskal atau fiscal multiplier effect, di mana setiap rupiah belanja pemerintah menghasilkan multiplier lebih besar dalam aktivitas ekonomi secara luas.

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Keterkaitan dengan Intervensi Pemerintah

Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang terutama ditentukan oleh faktor internal seperti akumulasi modal manusia, kemajuan teknologi, dan inovasi (Romer, 1990). Dalam kerangka ini, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memberikan insentif bagi kegiatan produktif, investasi pendidikan, serta riset dan pengembangan (R&D).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa investasi pemerintah di bidang infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan UMKM secara langsung meningkatkan produktivitas nasional (Aziz & Wibisono, 2022). Pemerintah juga berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat daya saing industri dalam negeri (Yusof & Yew, 2021). Secara keseluruhan, teori ini memposisikan pemerintah sebagai katalisator pembangunan, bukan hanya regulator pasif.

Dalam konsep transformasi struktural industri, peran pemerintah sangat esensial. Transformasi ini adalah proses perubahan struktur ekonomi di mana sektor pertanian bergeser ke sektor industri, lalu ke sektor jasa yang lebih maju. Peran pemerintah mencakup beberapa aspek utama:

- 1. Kebijakan Industri:** Pemerintah merancang kebijakan seperti investasi,

subsidi, regulasi, dan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor industri kunci yang mendukung transformasi struktural.

2. **Infrastruktur:** Pemerintah bertanggung jawab membangun infrastruktur pendukung, termasuk fisik (seperti jaringan transportasi dan energi) serta digital (seperti internet cepat dan andal).
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masa depan, termasuk pengembangan keterampilan yang relevan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas bahwa kebijakan ekonomi pemerintah memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan tidak hanya bergantung pada dinamika pasar bebas, tapi sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.

Kebijakan fiskal, misalnya, bekerja melalui pengeluaran negara yang massif seperti pembangunan infrastruktur jalan tol atau pelabuhan serta subsidi, bantuan sosial, dan

insentif pajak. Semua ini meningkatkan permintaan, membuka lapangan kerja baru, dan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan.

Sementara kebijakan moneter, yang dikelola Bank Indonesia, fokus menjaga inflasi rendah, suku bunga terkendali, nilai tukar rupiah stabil, serta kesehatan sistem keuangan sehingga aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat bisa berjalan lancar tanpa guncangan besar. Tak ketinggalan reformasi struktural, yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menarik investasi asing, memperkuat daya saing industri, dan mendorong transformasi dari sektor agraris ke industri dan jasa modern.

Ketiga pilar inifiskal, moneter, dan struktural. saling melengkapi seperti roda gigi dalam mesin pembangunan. Sinergi di antaranya jadi kunci utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memastikan kebijakan-kebijakan ini konsisten, efektif, dan adaptif terhadap tantangan seperti gejolak global atau perubahan teknologi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap stabil, inklusif manfaatnya dirasakan semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Rekomendasi saya, perkuat koordinasi antarlembaga, pantau dampak secara real-time, dan libatkan sektor swasta agar hasilnya lebih optimal.

REFRENSI

- Boediono. 2016. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2018. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. 2010. *Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Sukirno, Sadono. 2019. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2024. *Laporan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan APBN Kita*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KPU KAB-PEGUNUNGANBINTANG - Kebijakan Moneter: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Dampaknya pada Stabilitas Ekonomi Nasional
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html> - Badan pusat statistik indonesia
- Peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi-
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-apbn-bagi-pembangunan-dan-pertumbuhan-ekonomi-87e18f27/detail/>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen. Diakses dari:<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari:<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-apbn-bagi-pembangunan-dan-pertumbuhan-ekonomi-87e18f27/detail/>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. (2023). Kebijakan Moneter: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Dampaknya pada Stabilitas Ekonomi Nasional. Diakses dari:<https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/>
- Sadono Sukirno. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Untoro. (2010). Ekonomi. Jakarta:
Erlangga.

Boediono. (2016). Ekonomi Makro.
Yogyakarta: BPFE